

No. 09 | Januari-Maret '09

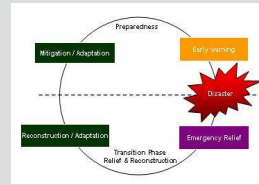
GTZ-GITEWS | Editorial

Peningkatan Kapasitas Masyarakat Lokal Kerjasama Indonesia-Jerman untuk Sistem Peringatan Dini Tsunami

Kajian & Perencanaan Proyek |
02



Partner Kami: BNPB |
07



Memfaatkan Hasil Percontohan |
09



Roundtable mengenai Rantai
Peringatan |
10



- 03 | Dukungan CIM bagi BMKG
- 04 | Berita dari Daerah Percontohan
- 08 | Mitra Kami: FRC
- 09 | Memanfaatkan Hasil Percontohan
- 11 | Momen penting dari Fase Pertama
- 12 | Tim Kami



Editorial

Proyek kami yang bertajuk "Peningkatan Kapasitas Masyarakat Lokal" ini telah memasuki fase kedua. Dalam minggu-minggu pertama tahun 2009, kami telah mengkaji ulang semua hasil pembelajaran yang didapat dari fase pertama, membahas tujuan serta mekanisme kerjasama dengan para mitra kami, dan menyusun rencana kerja bagi 15 bulan mendatang yang masih tersisa. Batasan waktu ini memang menantang kami untuk merampungkan semua output dari proyek ini, menjadikannya bahan diskusi dengan para mitra nasional dan memasukkannya ke dalam panduan-panduan – serta sekaligus mengintegrasikan pembaruan InaTEWS, khususnya terkait dengan Decision Support System (DSS) dan skema peringatan.

Setelah diresmikan pada bulan November lalu, sistem InaTEWS saat ini menjalani masa pengujian dan optimalisasi selama dua tahun. Selama fase ini, jaringan sensor akan dilengkapi dan diintegrasikan sepenuhnya ke dalam DSS. Sebagai bagian dari proses ini, skema peringatan baru akan diperkenalkan. Skema tersebut akan memberikan informasi tambahan bagi pengambil keputusan dan masyarakat berisiko di tingkat daerah, yaitu berupa tiga tingkat peringatan dini, serta informasi terinci mengenai wilayah yang kemungkinan terkena dampak. Tambahan tersebut akan mengubah prosedur pengambilan keputusan di tingkat daerah, dan menambah kemungkinan tindakan yang dapat diambil masyarakat setempat.

Mari kita sambut tantangan tugas ini sebagai satu upaya bersama memperkuat kemampuan masyarakat menghadapi bahaya tsunami! Kami selalu berharap dapat melanjutkan kerjasama dengan Anda semuanya.

Salam Hangat
Harald Spahn, Team Leader GTZ IS-GITEWS



Membahas pengalaman pembelajaran dengan mitra nasional & daerah di Yogyakarta / Peserta acara GTZ IS-GITEWS Project Review & Planning Workshop di Bali

Bersiap-siap untuk Fase Kedua

Selama minggu-minggu pertama tahun 2009, tim proyek telah membahas kajian mengenai pembelajaran yang didapat dari fase pertama, tujuan dan mekanisme kerjasama dengan para mitra dan mempersiapkan rencana kerja untuk sisa waktu proyek 15 bulan kedepan.

Belajar dari pengalaman Bantul

Pada tanggal 30 Januari, proyek ini mengadakan forum diskusi di Yogyakarta untuk bertukar pengalaman praktis antara pokja TEW di Bantul dan perwakilan dari lembaga-lembaga nasional (RISTEK, LIPI, BMKG, DEPDIAGRRI dan DKP) tentang bagaimana mengembangkan & menerapkan mekanisme serta prosedur Peringatan Dini Tsunami (TEW) di tingkat masyarakat. Pokja tersebut menjelaskan mengenai prosedur pembuatan keputusan dan penyebaran peringatan dini termasuk teknologi yang dipergunakan.



Bupati Bantul turut serta dalam tsunami drill (12/2008)

Fakta bahwa Bupati Bantul memutuskan untuk mendelegasikan pembuatan keputusan kepada PUSDALOPS setempat menjadi bahan diskusi hangat mengenai prosedur TEW daerah. Diakui, mengingat tenggat waktu yang pendek, pendelegasian wewenang berdasarkan SOP resmi nampaknya lebih praktis untuk memastikan adanya keputusan dalam waktu singkat.

Juga, forum tersebut mendiskusikan pentingnya mentransfer pengalaman dari proyek-proyek percontohan yang dilakukan oleh beberapa organisasi di berbagai wilayah Indonesia, serta mekanisme transfer tersebut. Disepakati pula bahwa diskusi akan dilanjutkan selama Project Review and Planning Workshop untuk proyek GTZ IS pada awal Februari di Bali.

Evaluasi & Perencanaan

Dari tanggal 26 Januari sampai 4 Februari diadakan suatu kunjungan tim evaluasi eksternal ke mitra proyek di Jakarta dan di daerah percontohan di Jawa dan Bali dengan tujuan mengidentifikasi pembelajaran apa yang diperoleh dari fase pertama serta menyusun masukan bagi perencanaan fase kedua ini.

Temuan tim ini telah dipresentasikan pada hari pertama Project Review & Planning Workshop yang berlangsung di Sanur antara tgl.5 dan 6 Februari. Hasil tersebut menunjukkan kemajuan yang signifikan. Di sisi lain, masih diperlukan klarifikasi lebih jauh mengenai kelembagaan dan juga peran serta tanggungjawab khususnya antara tingkat daerah dan pusat. Perlu diadakan suatu dialog lanjutan untuk memperjelas keterkaitan peran keduanya.

Rekomendasi yang dibuat untuk fase kedua termasuk fokus pada revisi dan finalisasi produk-produk, dan intensifikasi kerjasama dengan para mitra nasional agar memastikan hasil pengalaman dari Daerah Percontohan diintegrasikan ke diskusi di tingkat nasional dan dimasukkan ke dalam panduan-panduan nantinya.



Diskusi dengan mitra nasional selama workshop

Selama workshop tersebut, diadakan pertemuan antar mitra nasional, yang menghasilkan klarifikasi peran BNPB sebagai rekan strategis baru dalam proyek ini.

Harald Spahn
harald.spahn@gtz.de

Team Retreat

Hasil dari workshop mengenai evaluasi, kajian dan perencanaan tersebut memberi tim semua masukan yang diperlukan untuk memulai dengan pengembangan rencana kerja yang realistis dan dapat tercapai untuk ketiga Daerah Percontohan dan kerjasama di tingkat nasional.

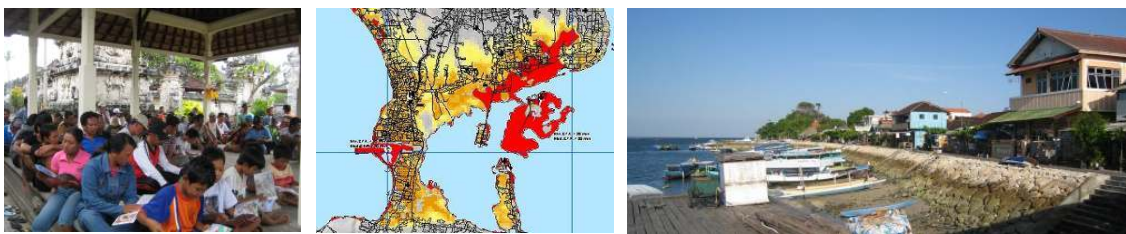
Tim kemudian memilih mengadakan *retreat* selama beberapa hari dalam suasana informal dan tenang, mendiskusikan secara mendalam apa langkah berikutnya, merevisi konsep teknis dan memperkuat kerjasama – yang selalu menjadi tantangan bagi tim yang tersebar di empat wilayah dan jarang bertemu.



Semangat individu dan tim telah tertantang dalam beberapa kegiatan outbound di lingkungan alamiah di Salatiga, Jawa Tengah.

Diakui bahwa beberapa kegiatan luar ruangan ini tidak hanya menambah semangat kelompok, tapi juga memacu adrenalin para peserta ...





Kegiatan sosialisasi di tingkat desa / Peta Bahaya Tsunami untuk Bali Selatan / Daerah pesisir Tanjung Benoa

Berita dari Daerah Percontohan

Daerah Percontohan Bali

Hasil dari dua proses pekerjaan utama terkait kesiapsiagaan tsunami di Bali telah dirangkum dan didokumentasikan selama beberapa minggu yang lalu. Dokumentasi pemetaan bahaya tsunami serta penyiapan sistem peringatan dini memberi para pengambil keputusan setempat suatu konsep lengkap dan referensi untuk penerapan lebih lanjut dari InaTEWS di kawasan Bali.

Makalah Konsep TEW Bali

Sebagai hasil diskusi mengenai pengalaman proyek peringatan dini tsunami (TEW) di Bali, satu makalah konsep lengkap telah ditulis, berisi informasi latar belakang, nasihat teknis, dan rekomendasi bagi pengambil keputusan lokal mengenai bagaimana menerapkan TEW di Bali. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana membangun kerangka kerja, keterkaitan dan prosedur, serta memperkuat kemampuan Bali secara mandiri, sehingga pemda dan pemangku kepentingan lainnya dapat menjalankan peran mereka dalam kesiapsiagaan menghadapi bahaya tsunami.

Dokumen Teknis: Peta Bahaya Tsunami untuk Bali Selatan

Satu dokumen teknis telah dikembangkan oleh DLR dan GTZ IS bekerjasama dengan Pokja Bali untuk Pemetaan Bahaya Tsunami, guna memberi para pengambil keputusan informasi latar menyeluruh mengenai bahaya dan pendekatan multi-skenario bagi pemetaan bahaya tsunami untuk Bali Selatan. Peta itu sendiri merupakan hasil kerjasama berbagai lembaga termasuk Pemda Bali, lembaga ilmu pengetahuan Indonesia dan lembaga mitra dalam Proyek GITEWS.

Kedua dokumen penting ini akan diserahkan kepada Pemda Bali di awal bulan April.

Prosedur Evakuasi Tanjung Benoa

Sebagai satu desa kecil di ujung semenanjung Nusa Dua, Tanjung Benoa dijadikan contoh bagaimana membangun prosedur evakuasi yang melibatkan hotel-hotel di wilayah wisatawan terkenal di Bali tersebut.

Masyarakat memang harus mengandalkan bangunan hotel-hotel tersebut untuk evakuasi vertikal karena tidak ada bukit atau gunung di daerah tersebut, sementara akses yang ada hanyalah satu jalan memanjang di semenanjung tersebut.



Dalam pertemuan tanggal 5 Maret di Ramada Hotel, perwakilan masyarakat dan manajemen hotel-hotel tersebut menyepakati satu prosedur sederhana yang memudahkan evakuasi sementara para warga desa Tanjung Benoa bila terjadi darurat tsunami di kawasan Bali Selatan. Disepakati juga pemasangan petunjuk serta visualisasi prosedur dalam bentuk peta yang akan dikomunikasikan dengan warga setempat yang tinggal di sekitar hotel. Prakarsa ini didukung sepenuhnya oleh PMI, BHA dan GTZ.

Gede Sudiarta
i.sudiarta@gtz.de

Harald Spahn
harald.spahn@gtz.de

Rencana Evakuasi untuk Kelurahan Kuta

Satu kelompok kerja (pokja) dari lembaga masyarakat, swasta dan LSM setempat di Kabupaten Badung juga mengembangkan rencana evakuasi bila terjadi tsunami di Kuta. Kelompok ini menggunakan input dan hasil prakarsa organisasi lain sebagai acuannya. Peta evakuasi yang mereka hasilkan berdasarkan peta bahaya tsunami untuk Bali Selatan. BAP-PEDA dan Univ. Udayana menyediakan data dasar, keahlian GIS serta layanan pemetaan. Prakarsa ini didukung oleh DLR & UNU.

Penyebaran Pengetahuan Dasar Tentang Tsunami di Desa-desa Pesisir Bali

Suatu kampanye guna menyebarluaskan pengetahuan dasar tentang bahaya tsunami dan TEW telah dilanjutkan di desa-desa pesisir selatan Bali. Target pesertanya adalah para wakil Desa Adat, pemuda, organisasi PKK dan lembaga kemasyarakatan lain di tingkat desa. Rata-rata 30 sampai 40 orang hadir di setiap pertemuan. Di desa Kerobokan Kelod, pertemuan semacam ini juga menghadirkan penyanyi Bali terkenal, Widi Widiana, dan lebih dari 1000 orang hadir dalam kesempatan ini.

Langkah Berikutnya bagi Bali

Rencana proyek ini selanjutnya adalah mendukung pendirian layanan TEW 24 jam di Bali. Prakarsa ini memang nantinya tergantung dari bagaimana pemda secara resmi menetapkan mekanisme dan prosedur pembuatan keputusan serta penyebaran pesan peringatan dan pengoperasian PUSDALOPS 24 jam di tingkat provinsi. Juga akan didukung proses penyempurnaan perencanaan evakuasi di Kabupaten Badung.



Pemandangan Pantai Logending di Kebumen dari atas bukit: pantai yang ramai sebagai tempat wisata lokal ini terletak di perbatasan Kebumen dan Cilacap.

Daerah Percontohan Jawa

Selama kwartal pertama 2009, tiga kabupaten di Daerah Percontohan Jawa telah menyelesaikan tugas-tugas yang dimulai pada akhir tahun 2008. Khususnya Bantul dan Kebumen, punya kesempatan melakukan kajian ulang pencapaian dan kemajuan sampai saat ini. Hasilnya membantu tiga kabupaten dalam proses perencanaan yang realistis untuk fase ke-2.

Pemasangan Peralatan dan Rambu

Sejak Januari sampai Maret 2009, Cilacap dan Kebumen sudah memasang sirine sebagai alat pemberitahuan peringatan tsunami, dan tanda arah evakuasi di lokasi-lokasi yang telah ditentukan tahun lalu.

Di Cilacap, satu rangkaian alat sirine sudah terpasang di Kelurahan Tegal Kamulyan (Kecamatan Cilacap Tengah) dan satu lagi di pantai wisata Teluk Penyun (Kecamatan Cilacap). Alat-alat komunikasi dasar telah terpasang di salah satu ruangan di kantor BPBD yang baru. Semua peralatan baru ini telah diuji dan berjalan baik. Selain itu, rambu evakuasi juga dipasang di dua desa tersebut, ditambah dua desa lain yaitu Jetis di Kecamatan Nusawungu dan Bunton di Kecamatan Adipala.

Di Kebumen, unit sirine yang sama juga telah terpasang di masjid Al Amin di Desa Karang Gadung (Kecamatan Petanahan) serta di pantai wisata Logending di Desa Ayah (Kecamatan Ayah). Sementara itu, perangkat komunikasi yang akan menjadi dasar operasi PUSDALOPS nantinya sedang dipasang sementara di Rumah Dinas Bupati. Satu unit repeater yang menghubungkan PUSDALOPS dan sistem sirine tersebut dipasang di menara di Bukit Argopeni. Rencananya, semua perangkat tersebut akan dites bersama di kwartal kedua 2009. Tidak lupa tanda petunjuk evakuasi telah terpasang di lokasi yang telah disepakati di kedua desa tersebut.

Kajian Proyek dan Rencana 2009

Satu tim evaluator eksternal (Babette Wehrmann & Retno Winahyu) mengunjungi beberapa lokasi proyek dan berdiskusi dengan anggota pokja setempat, fasilitator lokal serta perwakilan warga setempat di Kebumen dan Bantul pada akhir Januari 2008. Misinya adalah mengidentifikasi kemajuan-kemajuan yang menonjol selama fase pertama, dan rekomendasi tindakan ke depannya.

Rekomendasi tim ini telah diterima oleh para perwakilan pokja dari ketiga kabupaten tersebut, dan oleh GTZ IS, selama pertemuan di bulan Februari untuk menyusun rencana kerja pada Fase Kedua kegiatan di Daerah Percontohan Jawa. Rancangan rencana kerja tersebut akan berisi masukan dari semua partner berupa tugas-tugas dan hal-hal realistis yang harus dilaksanakan di tiga kabupaten tersebut.



Para teknisi sedang memasang satu unit repeater di Bukit Argopeni, Kebumen

*Benny Usdianto
benny.usdianto@gtz.de*

Semangat Baru di Fase 2

Kemajuan pesat di tiga kabupaten di Jawa yang terjadi dalam dua tahun terakhir ini terutama disumbangkan oleh para anggota pokja yang berkomitmen penuh terhadap tugasnya. Tugas formal mereka berakhir pada akhir tahun 2008.

Setiap kabupaten kini sedang mengupayakan cara agar keberhasilan yang sama dapat diulangi di fase kedua, baik dengan anggota pokja yang sama ataupun yang baru.

Bagaimana ketiga kabupaten tersebut akan menyamakan visi di antara mereka, dan dengan yang berwenang di tingkat provinsi, agar mampu bersama-sama menangani bahaya potensial tsunami, akan menjadi tantangan yang menarik bagi ketiga wilayah tersebut dalam fase ke-2.



Salah satu dari rambu petunjuk evakuasi yang dipasang di pinggir jalan Desa Karang Gadung. Tanda ini dimaksudkan mengarahkan penduduk menuju ke tempat aman, dan juga mempromosikan kesadaran warga bahwa daerah mereka rawan tsunami.

Langkah Berikutnya bagi Jawa

Workshop XII yang ditunda akan dijadwalkan diadakan di bulan Mei. Struktur Kelompok Kerja (Pokja) untuk Fase Kedua proyek ini akan segera ditentukan. Setiap kabupaten akan mengawasi perkembangan masing-masing sampai saat ini. Kebumen merencanakan menguji perlengkapan komunikasi yang baru terpasang.



Diskusi Teknis / Tsunami drill yang diprakarsai oleh kelompok SIBAT PMI / Seminar Regional

Padang

Sebagai titik awal kegiatan fase kedua kerjasama GTZ IS di Padang, para mitra telah menyusun bersama satu rencana kerja berisi proses-proses kunci agar TEW dapat beroperasi akhir tahun ini. Kegiatan utama untuk itu adalah finalisasi dan penyempurnaan rantai peringatan dini, sosialisasi SOP bagi pengambilan keputusan dan skema reaksi yang menggabungkan tanda-tanda alam dan berita dari INA-TEWS. Pada saat skema reaksi dan SOP itu telah diresmikan, maka harus disosialisasikan ke masyarakat berisiko. Untuk menguji sistem ini di Padang, para partner merencanakan suatu drill di satu wilayah percontohan di Kota Padang.

Rapat Teknis di TPS-PB membahas strategi pelaksanaan TEW ke depan

Untuk mengembangkan suatu sistem Penanggulangan Bencana di Padang, Pemko setempat telah membentuk kelompok yang disebut sebagai Tim Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana (TPS-PB) yang terdiri dari para perwakilan pemerintah: yaitu dari BAP-PEDA (sebagai koordinator), Badan Penanggulangan Bencana Daerah – BPBD, DIKNAS; dan lembaga lainnya seperti KOGAMI, PMI Padang, Global Rescue Network - GRN, dan GTZ IS (sebagai lembaga pendukung).

Secara umum, tugas TPS-PB adalah merancang dan mengkaji konsep, tindak lanjut serta pengawasan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana di Kota Padang.



GTZ IS mendukung TPS-PB terkait ke pelaksanaan INA-TEWS di Padang. Dalam rapat teknis pada tanggal 12-14 Februari 2009, yang melibatkan juga para perwakilan masyarakat dan wartawan setempat, TPS-PB serta para mitranya setuju akan satu skema reaksi dan SOP bagi TEW. Masalah lain yang dibahas adalah: rencana dan kerangka kerja strategis bagi Penanggulangan Bencana serta pengembangan kelembagaan BPBD dan PUSDALOPS.

Pembelajaran dari Tsunami Drill di Daerah Percontohan SIBAT

Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT) telah diselenggarakan oleh PMI Padang di tiga desa percontohan, yaitu Air Tawar Barat, Lubuk Buaya, dan Purus. Pada tanggal 22 Februari 2009, suatu kegiatan tsunami drill telah terlaksana. Selama simulasi tersebut, sistem peringatan dini tsunami (TEW) dipraktekkan dan diuji, yaitu dengan berita peringatan bahaya dari BMKG yang diterima otoritas setempat dan disebarkan ke masyarakat melalui radio dua arah di setiap Pos Siaga di masing-masing desa.

Manfaat dari adanya kelompok SIBAT ini adalah bahwa masyarakat terlatih untuk mengembangkan rencana pengurangan risiko bencana secara mandiri. Para anggota masyarakat juga telah dilatih untuk menjadi pelatih dan fasilitator rekan-rekan sesama, untuk mensosialisasikan kewaspadaan ini, menyusun peta risiko dan mengembangkan pola reaksi peringatan dini setempat yang dilakukan secara partisipatif.



Langkah berikutnya bagi PMI terkait dengan program SIBAT adalah menyelenggarakan SIBAT tidak hanya bagi masyarakat di daerah rawan tsunami, tapi juga di daerah aman; bagaimana mereka dapat mendukung dan membantu warga yang menyelamatkan diri.

Seminar Regional

“Membangun Model Kesiapsiagaan Bencana”

Pada tanggal 17-19 Maret 2009, KOGAMI, didukung oleh UNESCO-ISDR, menyelenggarakan seminar bertajuk “Membangun Model Kesiapsiagaan Bencana” yang bertujuan berbagi informasi serta pengalaman dalam hal kesiapsiagaan bencana dengan para aktor di wilayah Samudera Hindia dan lembaga / organisasi lokal dari Indonesia.

Para peserta seminar mendiskusikan, antara lain, bagaimana pelaksanaan kesiapsiagaan di Padang sejak 2005 sampai saat ini dalam hal kelembagaan, panduan, kesiapsiagaan masyarakat, peringatan dini, dan juga bagaimana Pemko Padang belajar dari pengalaman negara-negara lain yang terkena dampak tsunami Desember 2004.

Hari pertama seminar diisi dengan presentasi pengalaman dan pencapaian/ keberhasilan program, sementara hari kedua untuk kunjungan lapangan. Setelah kunjungan lapangan, para peserta memberikan masukan mereka mengenai aktivitas pengurangan risiko bencana di Padang. Para perwakilan masyarakat serta sekolah setempat juga memberikan pandangan mereka, bagaimana aktivitas kesiapsiagaan bencana ini berpengaruh pada hidup mereka.



willy.wicaksono@gtz.de
patrarinadewi@gmail.com

Langkah Berikutnya bagi Padang

Berdasarkan hasil dari rapat teknis lalu, terdapat kebutuhan untuk kajian lebih lanjut untuk bidang-bidang berikut ini: (1) Peta Bahaya Resmi, (2) Asesmen Kerentanan, (3) Pelembagaan Rantai Peringatan Tsunami, Skema Reaksi & SOP (4) Pengembangan & Pelatihan bagi staf PUSDALOPS, (5) Perencanaan Evakuasi & Kesadaran Masyarakat, serta (6) Simulasi & Drill



Muchiis, Wijayanto & Horst di Papua untuk menentukan lokasi stasiun seismik / Pusat Peringatan BMKG / Michael & Bayu Imbanglaxsono menyetel antenna VSAT .

Dukungan CIM bagi BMKG

Dalam rangka mendukung InaTEWS dengan keahlian keilmuan serta teknis, dua ahli GITEWS Jerman telah ditugaskan ke Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Horst Letz, seorang seismolog dengan segudang pengalaman praktis di bidang seismologi terapan, jaringan digital serta pengumpulan dan analisa data mulai bekerja di BMKG sejak November 2006. Michael Guenther, ahli IT, bergabung pada bulan Oktober 2007.

Kedua orang ahli (*Integrated Experts*) tersebut ditugaskan oleh *Center for International Migration and Development* (CIM). CIM mendukung kegiatan layanan publik, perusahaan swasta atau kemasyarakatan di negara mitra yang dipilih oleh *Federal Ministry for Economic Cooperation and Development* (BMZ) untuk bersama-sama mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dilakukan jika negara mitra tersebut tidak mampu menyediakan ahli berkualitas, atau spesialis manajemen senior, maka tenaga *Integrated Experts* tersebut akan disediakan oleh CIM untuk mengambil alih peran vital untuk mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan.

Kedua ahli CIM tersebut diharap dapat memberikan nasihat teknis dalam instalasi sistem TEW serta mendukung pengintegrasian komponen dari lembaga-lembaga Jerman dan Indonesia yang terlibat dalam proyek ini.

Termasuk di dalamnya konsultasi mengenai perencanaan operasional yang dilakukan dalam kerjasama erat dengan manajemen senior BMKG guna mendapatkan koordinasi dan sinkronisasi rencana dan langkah pelaksanaan dengan semua pihak terkait. Selain itu, kedua ahli tersebut juga memimpin dalam mendukung kelompok kerja saat mempersiapkan *setup* perangkat monitoring (seismic network, GPS atau tide gauge stations) dan memastikan bahwa semua dukungan logistik dan kebutuhan di daerah sudah siap pada waktunya.

Dalam kegiatan operasional harian, mereka bertugas mendukung staf Indonesia lewat nasihat praktis serta pemecahan masalah bersama. Misi mereka mengikuti tugas yang jelas. *'Training on the job'* menjadi sasaran utama pada saat suatu solusi teknis perlu dikembangkan.

Hal tersebut bisa dihubungkan dengan *automatic earthquake location program* (SeisComp3), jaringan komputer internal, server, router dan sambungan VSAT atau mungkin kasus tertentu dimana satu tide gauge, GPS atau stasiun seismik gagal merespons atau mengirimkan data ke BMKG.

Cara pemecahan masalah secara sistematis perlu dilatihkan, mengingat ini akan menjadi kunci dari kemandirian, dan dalam jangka panjang, mendukung kesuksesan fungsi BMKG. Tidak hanya konsultasi yang digabungkan dengan pengalaman praktis, tugas mereka juga menuntut dilakukannya 'pengalaman sendiri'.

Tugas berat itu menuntut fleksibilitas tinggi, dan kedua ahli tersebut siap menangani masalah-masalah khusus juga di luar jam kerja. Sesuai permintaan BMKG maka salah satu dari mereka akan selalu siap di Jakarta. Dengan demikian, tugas yang menuntut perjalanan dinas ke luar kota harus diatur dalam waktu yang tepat.

Kerjasama dengan rekan-rekan Indonesia selama ini berjalan lancar, mengingat setiap orang mendukung gagasan bekerja dalam satu tim. Semangat kerja tim dan komitmen dikuatkan dengan keputusan kedua ahli CIM untuk memakai seragam BMKG, yang cukup mengesankan bagi BMKG, masyarakat awam, sekaligus CIM. Ini menegaskan bahwa mereka mengidentifikasi diri mereka dengan tugas ini, dan lebih penting lagi, dengan BMKG sebagai atasan mereka. Hal ini ternyata berdampak positif bagi lingkungan kerjanya.

Horst Letz:
h_letz@yahoo.de

Michael Guenther:
guenther@gfz-potsdam.de

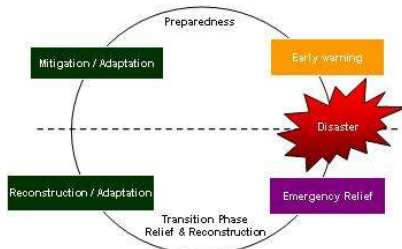
Tujuan Besar

Pengalaman mengajarkan kita bahwa di akhir proyek GITEWS pada tanggal 31 Maret 2010, akan muncul tuntutan bagi panduan dan dukungan praktis selanjutnya. Pada saat semua komponen teknis proyek ini telah terpasang dan beroperasi, reaksi dari sistem peringatan itu sendiri harus dipantau guna memastikan setiap komponen bekerja tepat selaras tanpa ada kendala. Saat diperlukan (dan hal ini umum terjadi untuk proyek teknis berskala sebesar ini) kadang satu komponen harus disesuaikan dan diperiksa agar fungsinya berjalan tepat. Untuk itu, suatu dukungan layanan berkelanjutan bagi BMKG akan dibutuhkan.



Jika sistem ini sudah berjalan baik dan stabil, langkah berikutnya adalah BMKG, didukung oleh hasil sistem yang handal, akan menerima tanggungjawab menjadi *Regional Tsunami Watch Provider*. Pada saat tersebut, BMKG telah mencapai tujuan besar mereka.





Siklus Penanggulangan Bencana / Kehancuran akibat gelombang tsunami di Aceh tahun 2004 / Logo BNPB

BNPB – Badan Nasional Penanggulangan Bencana: Mengambil Peran dalam INA-TEWS

Dengan terbitnya UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, Indonesia memulai era pergeseran dari orientasi tanggap darurat ke pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan. UU tersebut mentransformasikan BAKORNAS PB yang sifatnya sepenuhnya berpusat ke kegiatan tanggap darurat bencana, menjadi lembaga baru dan permanen bernama BNPB – Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pergeseran paradigma ini memunculkan kebutuhan penguatan kapasitas personal dan kelembagaan bagi Pengurangan Risiko Kebencanaan. Satu hal yang akan ditangani BNPB adalah INA-TEWS – sebagai sarana penting mengurangi risiko tsunami dan kesiapsiagaan masyarakat.

Pendahuluan

BNPB, yang resmi dibentuk pada bulan Januari 2008, adalah satu badan pemerintah non-departemen yang melapor langsung kepada Presiden. BNPB memegang dua fungsi utama: pertama, memformulasikan dan menerbitkan kebijakan terkait penanggulangan bencana di Indonesia. Kedua, mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas penanggulangan bencana dengan cara yang terencana, terpadu dan lengkap. Fungsi ini mencakup peran BNPB di dalam INA-TEWS.

Peran Utama BNPB dalam INATEWS

BNPB akan mengambil dua tanggungjawab utama dalam INA-TEWS. Sebelumnya, BAKORNAS PB menjadi aktor utama dalam pengembangan komponen hilir dari INA-TEWS (bersama-sama LIPI, DEPDAGRI, dan yang lainnya). BNPB akan mengambil peran sebagaimana yang dilakukan BAKORNAS PB serta memperkokoh komponen hilir tersebut. Kedua, karena RISTEK secara bertahap akan menyerahkan tanggungjawab yang saat ini dipegangnya sebagai koordinator INA-TEWS ke BNPB, maka badan baru ini – sesuai mandat yang diterimanya – telah memulai proses transisi tersebut di tahun 2009 ini.

Pengakuan BNPB atas Skenario Besar INATEWS

BNPB akan mengkoordinasikan INA-TEWS di masa mendatang. Namun harus diingat, sangat penting bahwa penyelesaian dan perawatan dari sistem ini memerlukan pengawasan terus-menerus dan intensif dari para ahli baik dari negeri ini maupun internasional. Dengan demikian, sebelum Skenario Besar ini selesai dibangun seluruhnya, BNPB masih akan mempertahankan komposisi dari lembaga-lembaga yang saat ini ada di dalam INA-TEWS dan proses kerjanya juga masih akan sama.

BNPB menganggap INA-TEWS sebagai suatu sistem peringatan dini (EWS) yang sangat lengkap, dan paling mendekati konsep dari ISDR mengenai suatu EWS yang berpusat pada masyarakat. Dengan demikian, BNPB sedang mempertimbangkan mengadopsi komponen INA-TEWS (sejauh memungkinkan) ke dalam EWS untuk bahaya bencana lainnya, dimana komponen hulu dan hilir tidak ditangani secara terpisah.

*Sugeng Triutomo (BNPB)
striutomo@gmail.com*

*Henny Vidiarina (GTZ IS)
henny.vidiarina@gtz.de*

BNPB & Peringatan Dini

Tugas prioritas dari sub-direktorat Sistem Peringatan Dini di BNPB adalah mengembangkan suatu EWS yang terpadu bagi Indonesia. Ini berarti mengembangkan suatu sistem peringatan yang memungkinkan pendekatan multi-bahaya, pengumpulan data dari berbagai sumber mengenai bahaya-bahaya yang berbeda. Suatu pusat peringatan dini terintegrasi semacam itu akan dibangun di EOC Nasional di kantor BNPB, Jakarta.

Tentunya, suatu analisa yang teliti dari setiap bahaya hadan implikasinya bagi suatu sistem peringatan dini yang efektif (misalnya jendela waktu yang sangat singkat untuk tsunami lokal) harus dilakukan. Untuk beberapa jenis bahaya dan bencana, tanggungjawab yang lebih besar dapat diberikan di tingkat nasional, yang akan mengurangi beban di tingkat lokal untuk tugas peringatan dini tersebut.

Dalam pendapat BNPB, kompleksitas suatu EWS memerlukan perjanjian resmi (lewat SK Kepala BNPB) yang memastikan adanya keterkaitan, koordinasi dan saling pertukaran antar aktor yang memegang empat komponen EW S: Pengetahuan Bahaya & Resiko, Pemantauan & Prakiraan, Penyebaran Peringatan Dini & Tanggapan terhadap Peringatan Dini.

BAKORNAS	BNPB
<p>1. Koordinasi namun bukan pelaksanaan</p> <p>BAKORNAS, di masa lalu, menjadi semacam badan koordinasi sementara yang terdiri dari perwakilan semua lembaga nasional terkait. Badan ini melakukan koordinasi antar sektor setelah suatu bencana terjadi.</p>	<p>1. Koordinasi dan pelaksanaan</p> <p>Selain melaksanakan koordinasi antar sektor, tugas BNPB adalah melaksanakan suatu pendekatan penanggulangan bencana yang terpadu dengan melihat ke keseluruhan siklus penanggulangan bencana: pra, selama dan setelah bencana.</p>
<p>2. Tidak ada fungsi komando</p> <p>Jika muncul kebutuhan tanggap darurat, maka arahan atau perintah untuk kegiatan tanggap darurat harus dilaksanakan oleh setiap lembaga terkait.</p>	<p>2. Fungsi komando</p> <p>BNPB berhak secara langsung mengeluarkan komando yang memobilisasi sumberdaya manusia, peralatan, logistik, dan institusi-institusi terkait yaitu Angkatan Bersenjata dan Polisi.</p>
<p>3. Karakter fungsional</p> <p>Penanggulangan bencana harus mengandalkan para personel yang diperbantukan / dikirim dari lembaga/badan pemerintah lainnya.</p> <p>Tidak ada dasar hukum yang memastikan efektivitas serta keberlangsungan kinerja dan kerja lembaga ini.</p> <p>Kepala Operasional BAKORNAS berada di bawah tingkat Menteri.</p> <p>Tidak ada anggaran operasional, hanya anggaran yang sewaktu-waktu dapat diminta dalam kondisi tanggap darurat bencana.</p> <p>Tidak ada ahli profesional yang dipekerjakan langsung, kecuali dibayar oleh lembaga terkait.</p>	<p>3. Karakter struktural</p> <p>Badan pelaksana (BNPB dan BPBD) menangani penanggulangan bencana dengan staf permanen yang mereka miliki sendiri.</p> <p>Undang-undang memungkinkan pengawasan atas kinerja secara optimal dan efektif.</p> <p>Kepala BNPB setingkat dengan Menteri.</p> <p>Alokasi anggaran per tahun yang meliputi biaya operasional dan peralatan untuk darurat bencana, anggaran kontinjensi bagi pelatihan masyarakat, dan anggaran yang dapat diminta sewaktu-waktu untuk tanggap darurat.</p> <p>Ahli-ahli profesional ditempatkan sebagai bagian dari lembaga ini.</p>



EOC Bali yang hampir selesai / Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika meletakkan batu pertama pembangunan EOC Bali/ Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam peletakan batu pertama pembangunan gedung EOC DI Yogyakarta

French Red Cross (FRC) – Palang Merah Perancis

Untuk program Peningkatan Kapasitas untuk Penanggulangan Bencana di Indonesia, FRC bekerjasama dengan Palang Merah Indonesian / PMI dan BNPB dalam membangun Emergency Operation Centre (EOC) di Bali, Yogyakarta dan Jambi. Program FRC tersebut meliputi pembangunan gedung dan peralatan, formulasi SOP termasuk juga pelatihan bagi para operator.

Mengapa Kita Perlu sebuah Emergency Operation Centre?

Pengesahan UU No.24 tahun 2007 menandai suatu pergeseran paradigma dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Khususnya titik perhatian pada hukum tersebut mensyaratkan bahwa penanggulangan bencana meliputi upaya menyeluruh dalam kesiapsiagaan bencana dan pengurangan risiko.

Pembangunan EOC menjadi sarana memperkuat kapasitas kelembagaan (dan khususnya bagi BPBD yang nantinya dibentuk di tingkat provinsi) dalam hal kesiapan mereka melaksanakan tanggap-darurat. Tantangan yang ada disini adalah perlunya satu mekanisme komando dan koordinasi (yang berjalan seiring dengan SOP) di antara semua pemangku kepentingan untuk dapat menangani suatu operasi pemulihan paska bencana secara lebih efisien, berdasarkan kebutuhan dan bertanggung-jawab.

Sebagai alat bantu pengelolaan yang lengkap untuk mendukung tugas BPBD, EOC akan bertanggungjawab dalam menjaga upaya berbagi informasi terbaru secara efektif di antara lembaga-lembaga setempat selama masa pra-bencana. Pada saat bencana, peran EOC lebih ditekankan pada memastikan adanya jalur komando yang efektif dalam operasi kedaruratan, dengan mengambil alih fungsi pos komando penanganan bencana.



Sesi penyusunan Panduan EOC di Bali

Kemajuan Pembangunan EOC di Bali, DIY dan Jambi

Pada tahun 2008, empat EOC di BNPB dan di tiga provinsi yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat dan DKI Jakarta telah berdiri dengan bantuan dari Pemerintah Perancis. Saat ini, bekerjasama dengan BNPB, FRC melanjutkan pembangunan 3 EOC di Jambi, DI Yogyakarta dan Bali.

Atas prakarsa FRC, Bali menjadi yang pertama untuk memulai pembangunan gedung EOC, dengan upacara peletakan batu pertama pada tanggal 12 November 2008 kemarin. Di Yogyakarta, upacara yang sama diselenggarakan pada tanggal 22 Januari 2009.

Bangunan EOC di Bali diperkirakan akan selesai pada bulan April ini, dan di Yogyakarta bulan Mei, sementara pekerjaan konstruksi untuk EOC Jambi baru dimulai pada bulan Maret 2009. Pemasangan peralatan dan sistem diharapkan dapat dimulai pada bulan Juli di ketiga provinsi, sehingga semua pengadaan untuk ketiga proyek pembangunan ini diperkirakan selesai antara Oktober dan November 2009.

Sejak November 2008, telah dilakukan diskusi dengan pemda setempat guna menyusun panduan operasional di tingkat provinsi, sebagai langkah pertama sebelum pelaksanaan pelatihan bagi para manajer dan operator fasilitas tersebut. Dalam hal ini, pelembagaan dari EOC sebagai unit teknis dibawah BPBD akan menjadi langkah penting sebelum penunjukan dan pelatihan para stafnya.

Kerjasama dengan GTZ IS dan Mitra Lainnya

Kerjasama FRC pertamakali di negara ini pastilah dengan PMI, dan keduanya telah menandatangani suatu MOU. PMI dilibatkan dalam setiap tahapan program dan melaksanakan aktivitas sendiri di tingkat masyarakat di wilayah pembangunan EOC (di 6 provinsi).

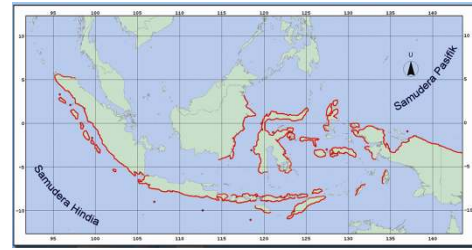
Di tingkat nasional, FRC telah melibatkan berbagai lembaga nasional lain untuk menyusun suatu Panduan Nasional EOC, yang saat ini dalam tahap akhir. Di tingkat provinsi, panduan tersebut juga dikembangkan dalam bentuk sejumlah SOP bersama para mitra setempat.

Di Bali, FRC bekerjasama dengan GTZ IS (terkait dengan TEW) dan IDEP Foundation dalam pengembangan prosedur dan sumberdaya manusia untuk mendukung Kesbangpol & Linmas, bersamaan dengan pembangunan EOC. Upaya yang sama juga sedang berjalan di Yogyakarta dengan tim GTZ IS setempat.

Sebagai pusat informasi dan komunikasi, diharapkan EOC nantinya akan memainkan peran yang efektif dalam penyebaran peringatan dini ke lembaga-lembaga setempat dan terutama ke masyarakat rentan bencana. Untuk peringatan dini tsunami diperlukan prosedur khusus, mengingat singkatnya waktu yang tersedia dan banyaknya pemain yang terlibat.

*Hervé GAZEAU,
Programme Coordinator
dpr-jak.frc@croix-rouge.fr*

*Satya Budi Utama,
Programme Manager
crf.jak.dm1@gmail.com*



Kerusakan di Pangandaran akibat gelombang tsunami / Berbagi hasil pembelajaran / Wilayah-wilayah rawan tsunami di Indonesia

Memanfaatkan Hasil Proyek Percontohan GITEWS bagi Wilayah Rawan Tsunami lainnya di Indonesia

Berdasarkan pengalaman di tiga Daerah Percontohan, telah dikembangkan mekanisme kesiapsiagaan dan peringatan tsunami sebagai kontribusi bagi strategi nasional untuk penguatan kapasitas dalam INA-TEWS. Hasil proyek ini sedang didokumentasikan dalam bentuk praktek-praktek terbaik dan pembelajaran – mitra GITEWS lainnya dan mitra Indonesia juga ikut dalam proses ini. Project Review and Planning Workshop (5-6 Februari 2009) menjadi ajang diskusi bagaimana hasil tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat INA-TEWS dan BNPB, sebagai koordinator dari sistem ini di masa mendatang, dan untuk mendukung kesiapsiagaan komunitas rawan tsunami lain di Indonesia.

Transisi dari RISTEK ke BNPB

Sebagaimana dinyatakan oleh para mitra nasional selama Project Review and Planning Workshop, pada dasarnya semua pembelajaran dan hasil yang didokumentasikan dari Daerah Percontohan GITEWS disambut baik dan akan digunakan. Agar terjadi suatu transisi yang lancar atas semua hasil pengalaman, suatu strategi telah dibahas yang mempertimbangkan serah terima di INA-TEWS nantinya.

RISTEK saat ini adalah koordinator pengembangan INA-TEWS, sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menjadi pelaku utama di masa mendatang: yang mengkoordinasikan, mempertahankan dan mengembangkan lebih lanjut sistem ini beserta komponen-komponennya. Keseluruhan tanggungjawab INA-TEWS secara bertahap akan diserahkan ke badan yang baru ini (baca artikel khusus mengenai BNPB).

Telah disepakati bahwa BNPB akan menjadi badan yang menerima hasil-hasil GITEWS terkait dengan komponen hilir (*downstream*) INA-TEWS. Hasil yang terkait peringatan dini serta perangkat kesiapsiagaan akan dibahas langsung dengan BNPB, melibatkan baik RISTEK maupun DEPDAGRI selama fase peralihan tersebut.

Mentransfer hasil, pembelajaran dan praktek terbaik ke tangan BNPB

Suatu mekanisme kerja dalam upaya mentransfer hasil-hasil konkrit pengalaman GITEWS (lihat daftar di sebelah kanan) dan dari pelaku nasional lain di bidang kesiapsiagaan tsunami sedang diperbincangkan. Pembicaraan awal menyorot fakta bahwa BNPB saat ini masih dalam tahap pembentukan ketrampilan teknisnya. Dengan demikian, semua pemangku kepentingan mengakui perlunya dukungan kuat bagi BNPB agar kapasitas badan ini (di masa mendatang) sebagai koordinator INA-TEWS tidak diragukan.

Transfer pengetahuan membutuhkan diskusi teknis dengan pihak BNPB dan melibatkan lembaga-lembaga nasional lain termasuk para mitra GITEWS. Dalam proses ini, pendekatan dan konsep yang telah dikembangkan akan dikaji ulang dalam sudut pandang teknis. Pertemuan Round Table yang membahas rantai peringatan tsunami dapat dianggap sebagai awal yang menjanjikan bagi proses ini (baca bagian Roundtable "Rantai Peringatan").

Secara umum telah disepakati bahwa hasil dari diskusi teknis ini dalam berbagai aspeknya akan diintegrasikan langsung ke panduan dan manual tingkat nasional yang akan dibuat dan diterbitkan oleh BNPB.

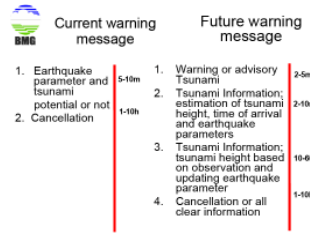
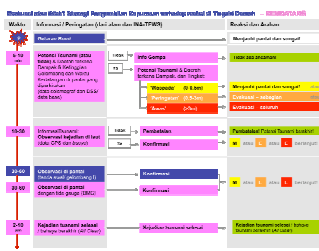
Hasil proyek GITEWS yang bisa ditawarkan...

GITEWS akan menyediakan input dalam komponen-komponen berikut ini, terkait dengan sistem TEW Indonesia, bagi kepentingan BNPB:

- *Rantai Peringatan Dini Tsunami* dari BMKG kepada masyarakat berisiko, termasuk Skema Reaksi Standar, SOP & Manual Operasi untuk Pos Siaga 24/7 setempat (dibicarakan selama Roundtable mengenai Rantai Peringatan)
- Produk-produk *Asesmen Risiko* berupa peta dan metodologinya (DLR/UNU/LIPI)
- *Rencana Evakuasi* di tingkat kabupaten dan kota (masuk dari GTZ, DLR, DKP akan dibahas)
- *Simulasi & Drill* (pembelajaran dari beberapa drill nasional yang dilaksanakan oleh RISTEK & lainnya)
- *Modul Pelatihan & Materi Kesadaran*
- *Perencanaan Kontinjensi*

Daftar di atas adalah kompilasi dari input utama yang dapat ditawarkan ke BNPB.

Michael W. Hoppe
michael.hoppe@gtz.de



Skema Reaksi Standar / Skema Peringatan Dini saat ini & mendatang / Peserta pada Round Table Meeting

Hasil Roundtable Pemangku Kepentingan Nasional ke-4: Menyusun sebuah Pedoman untuk Pengembangan dan Pemeliharaan Rantai Peringatan Tsunami yang efektif

Tujuan dari roundtable para pemangku kepentingan INA-TEWS – yang diorganisir oleh BGR – adalah guna memfasilitasi rancangan dari kebijakan tingkat tinggi dan kerangka kerja kelembagaan yang memastikan adanya peringatan dini yang efektif bagi masyarakat berisiko. Roundtable ke-4 membahas masalah yang belum terpecahkan, yaitu rantai peringatan dini tsunami mulai dari BMKG ke masyarakat pesisir. Kesepakatan yang diambil para peserta adalah adanya kebutuhan menyusun rancangan panduan tingkat nasional untuk memperkuat kapasitas pemda dan masyarakat setempat agar dapat menghubungkan diri mereka secara efektif dengan INA-TEWS.

Pembicaraan tentang Masalah yang Belum Terpecahkan

Sebagai satu input bagi roundtable tersebut, GTZ IS memberikan satu makalah yang menganalisa hambatan saat ini serta menawarkan usulan bagi penyempurnaan rantai peringatan yang ada. Penekanannya adalah pada peran masing-masing lembaga dalam INA-TEWS dan tantangan khusus dari ancaman tsunami lokal, yang hanya menyisakan waktu sangat pendek untuk menyampaikan peringatan dini.

Berdasarkan makalah tersebut, titik awal diskusi diletakkan pada ketiadaan panduan dari Pusat Peringatan Nasional yang (sesuai mandatnya) pada saat ini hanya memberi peringatan tapi bukan rekomendasi bagaimana masyarakat harus bereaksi atas pengumuman itu (memberikan rekomendasi tersebut adalah tanggungjawab pemda setempat). Pembagian tugas tersebut membawa beberapa implikasi:

- Harus diasumsikan bahwa tidak semua anggota masyarakat berisiko menerima panduan bagaimana bereaksi. Dengan demikian, mereka hanya menggantungkan diri pada peringatan dari BMKG (jika diterima) dan memutuskan sendiri apa yang harus dilakukan. Tetapi, peringatan dini tanpa panduan yang jelas tidak otomatis memicu reaksi yang diharapkan.
- Otoritas setempat harus punya layanan 24/7 untuk peringatan dini. Berarti harus ada staf terlatih, dan sumberdaya besar untuk operasinya – ini sangat berat dan meragukan bagi banyak pemda di wilayah rawan tsunami di Indonesia.

Diskusi mengenai mandat bagi panduan (dan perintah evakuasi) menjurus ke kesimpulan bahwa mungkin perlu ada kajian ulang atas mandat dan otoritas BMKG.

Agar dapat menangani masalah ini, dengan mandat yang ada untuk INA-TEWS pada saat ini, peserta menyetujui usulan dari makalah tersebut, yaitu mendorong adanya skema reaksi standar di tingkat lokal. Skema semacam ini menjadi semacam alat interpretasi standar untuk peringatan dini dari BMKG dan dengan demikian, memungkinkan reaksi yang cepat oleh masyarakat.

Para peserta mengakui dan menghargai adanya skema semacam itu, yang nanti bisa diterapkan pada saat skema sistem pendukung BMKG masa depan (berdasarkan Decision Support System, DSS) sudah beroperasi.

Diskusi ini juga menyentuh permasalahan apakah tingkat pemerintah provinsi atau kabupaten/kotamadya yang harus membuat keputusan setelah ada peringatan dini dikeluarkan oleh BMKG. Menurut hukum, disepakati bahwa tanggungjawab perintah evakuasi ada di tangan pemkab/pemko. Pengecualiannya adalah, jika ada suatu perjanjian ditandatangani antara tingkat pemerintah daerah. Bali contohnya, di mana mandat perintah evakuasi akan dipegang Pemprov. Ini akan mengurangi keharusan kabupaten mendirikan pusat peringatan lokal, sehingga dari delapan pusat di tiap kabupaten, menjadi hanya satu di tingkat provinsi.

Peserta roundtable mengakui adanya kebutuhan pembahasan mengenai tingkat pemerintahan yang seharusnya bertanggung-jawab menindak-lanjuti peringatan dini tersebut (serta perintah evakuasinya) sebelum gelombang tsunami menerjang, yang bisa sekaligus berdampak pada beberapa wilayah kabupaten atau provinsi. Rantai peringatan dini perlu dibuat sependek mungkin agar semakin banyak waktu dihemat dan nyawa diselamatkan. Dengan demikian, perlu juga dialog mengenai perpanjangan mandat BMKG dalam INA-TEWS dan isi pesan peringatan dini masa mendatang.

Disepakati pula bahwa penggunaan prosedur operasi standar (SOP) untuk pembuatan keputusan dan penyebaran peringatan di tingkat daerah dapat membantu pemda mengatasi ketidakpastian ini dan bereaksi lebih cepat. Juga semua peserta setuju dengan rekomendasi mengenai protokol standar penggunaan sirine yang harus diresmikan.

Kesimpulan dan Tindak Lanjut

BGR akan menyediakan dokumentasi roundtable, mendistribusikannya ke semua, dan melakukan tindak lanjut dengan BNPB. Pihak yang relevan akan diikutsertakan dalam suatu pokja untuk melanjutkan diskusi & kajian teknis ini, untuk melihat outline dan rancangan pedoman, bekerja sama dengan BNPB dan dibawah koordinasi pihak RISTEK.

Usulan outline pedoman nasional untuk pengembangan rantai peringatan dini tsunami

Di bawah ini dijelaskan suatu usulan awal yang akan dibahas lebih lanjut dengan beberapa lembaga terkait (antara lain LIPI dan DKP) di tingkat nasional – dibawah koordinasi RISTEK dan dalam kerjasama erat dengan BNPB:

- Konsep keseluruhan dari INA-TEWS
- Kerangka kerja umum tentang rantai peringatan dini tsunami.
- Peran dan tanggungjawab di berbagai tingkatan (nasional / provinsi / kab / kota)
- Integrasi kelembagaan dari TEW di tingkat lokal.
- Skema Reaksi Standar
- Prosedur Operasional Standard (SOP) bagi pembuatan keputusan dan penyebaran lewat layanan 24/7 di tingkat daerah
- Pusdalops
- Protokol penggunaan sirine: bunyi standar dan pengoperasian sirine
- Contoh pesan text standar yang menyediakan arahan bagi masyarakat berisiko
- Panduan & referensi untuk informasi lebih lanjut.

*Michael W. Hoppe
michael.hoppe@gtz.de*



Dari tsunami Pangandaran di bulan Juli 2006 ke peresmian InaTEWS di bulan November 2008: pencapaian pelaksanaan fase pertama Proyek ini

GTZ IS – Peningkatan Kapasitas Komunitas Lokal (GITEWS WP 6300): Beberapa Tahap Pencapaian Fase Pertama

Sekali lagi alam lebih cepat. Bahkan sebelum proyek ini selesai mendefinisikan strategi kerjanya, satu lagi bencana tsunami menghantam pesisir Indonesia pada tanggal 17 Juli 2006. Tsunami Pangandaran menjadi pelajaran berat buat kita semua; tanpa kesiapsiagaan masyarakat dan tanpa rantai peringatan “ujung-ke-ujung” (*end-to-end*), maka semua upaya membangun sistem peringatan dini tsunami ini akan sia-sia. Sejak tanggal 17 Juli tersebut, ‘*last mile*’ ini mendapat banyak perhatian, dan ini membantu proyek dalam berkontribusi pada pembentukan mekanisme dan prosedur peringatan dini di tingkat daerah. Halaman ini bercerita mengenai beberapa tahap pencapaian dalam fase pertama (06/2006-12/2008) dari proyek Peningkatan Kapasitas Masyarakat Lokal.



Langkah Awal: selama workshop perencanaan pertama di Jakarta pada bulan Agustus 2006 strategi proyek ini disepakati.



Daerah Percontohan Bali: satu Consultation Workshop mengenai pemetaan bahaya tsunami meletakkan dasar pengembangan peta bahaya resmi bagi wilayah pesisir selatan Bali.



Rangkaian Workshop SOP, satu upaya bersama antara pihak Indonesia & internasional di tahun 2006 / 2007 yang membahas prosedur dan keterkaitan antara masyarakat dan sistem peringatan dini.



Daerah Percontohan Jawa: konsep dan prosedur yang sudah jadi diterapkan ke lapangan. Warga Kabupaten Bantul melakukan tsunami drill (*end-to-end*) di bulan Desember 2008 yang diikuti oleh beberapa ribu warga desa setempat.



Satu **Poster Penyadaran Tsunami** dibuat pada tahun 2006 untuk mendorong terciptanya kesadaran masyarakat setempat dan memberikan pengetahuan dasar mengenai sistem peringatan dini.



Tingkat Nasional: Pada tanggal 11 November 2008, perwakilan dari berbagai negara yang mendukung INA-TEWS menyaksikan peresmian sistem ini oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta. Thomas Rachel, State Secretary dari Federal Ministry of Education and Research (BMBF) mewakili Pemerintah Jerman dan kontribusi mereka bagi sistem tersebut (GITEWS).

Memulai Fase Kedua: Mengawali Aktivitas di Januari dan Februari

Diawal fase kedua GTZ IS-GITEWS (01/2009-03/2010) tim proyek telah menyelenggarakan kajian dan perencanaan, sejak tanggal 25 Januari sampai 7 Februari 2009. Satu tim konsultan eksternal mengkaji pencapaian dan tantangan fase pertama dan mendukung pengembangan strategi untuk fase kedua. Sejumlah rapat konsultatif juga diselenggarakan bersama para mitra GITEWS dan Indonesia di tingkat nasional dan di Daerah-daerah Percontohan.

26 Januari: Rapat antara rekan-rekan dari WP 6000 (GITEWS Capacity Building) dan perwakilan dari Kedutaan Besar Jerman di Indonesia.

27 Januari: Rapat konsultatif bersama para mitra nasional yaitu RISTEK, BMKG, LIPI, DEPDAGRI, BNPB, UNESCO-JKT untuk memperjelas konsep penguatan kapasitas bagi INA-TEWS, kerjasama & kemitraan.

28-31 Januari: Kunjungan oleh dua kelompok terpisah ke Daerah Percontohan Jawa & Padang, dengan tujuan, untuk wilayah Jawa, memperjelas kemungkinan kerjasama antar kabupaten, mengkaji pencapaian PUSDALOPS setempat, SOP, dan skema reaksi standar. Sedangkan di Padang, tim mencoba memperjelas konsep TEWS, mengkaji koordinasi antara pelaku lembaga-lembaga Jerman (DLR/UNU, GTZ, Proyek GITEWS & Last Mile Project) dan juga para mitra dari Indonesia, keterkaitan antara Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat, serta peran & tanggungjawab para pelaku utama di Padang.

2-3 Februari: Kunjungan ke Daerah Percontohan Bali, dimana tim kajian, mengadakan pertemuan dengan perwakilan setempat masyarakat Tanjung Benoa dan mewawancarai mitra dari Pemprov Bali dan Pemkab Badung. Tujuan kunjungan ini adalah memperjelas Pemetaan Bahaya, PUSDALOPS, kerjasama dengan PMI di Bali, dan dengan sektor pariwisata.

5-6 Februari: Sebuah Project Review & Planning Workshop diselenggarakan di Bali, dimana hasil kajian dan evaluasi misi kunjungan dipresentasikan. Kesempatan ini digunakan oleh semua mitra proyek baik lokal, nasional ataupun internasional untuk berdiskusi mengenai strategi dan mekanisme kerjasama untuk fase kedua dari proyek ini.

Februari: dalam rangkaian pertemuan tindak lanjut dengan mitra nasional (RISTEK, DEPDAGRI, BNPB), lembaga-lembaga Peningkatan Kapasitas GITEWS, yaitu BGR, InWEnt dan GTZ IS, mendiskusikan detail kerjasama.

Henny Vidiarina
Henny.vidiarina@gtz.de

Selamat Bergabung



Jenik Andreas (ds.jenik@gtz.de) sebelumnya bekerja untuk proyek GTZ Good Local Governance (GLG) dan saat ini bergabung sebagai Project Assistant bagi Local Adviser Daerah Percontohan Jawa, Benny Usdianto. Sebagai ahli di bidang perencanaan tata ruang, Jenik mendapatkan pengalaman manajemen perencanaan saat dia bergabung dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi paska tsunami di Aceh (2005) dan setelah gempa besar di Yogya (2006). Bersama tim GTZ IS-GITEWS Jenik ingin mengembangkan pengalamannya baik sebagai manfaat bagi dirinya maupun bagi mereka yang membutuhkan dukungan dan bantuannya.

Team Retreat

23-27 Februari 2009



Setelah mengadakan kegiatan Project Review & Planning Workshop, proyek ini telah mengembangkan satu strategi konkrit untuk waktu yang masih tersisa sampai Maret 2010. Untuk lebih memperkokoh semangat kerja dalam tim ini, memahami konsep teknis dan produk yang dihasilkan oleh proyek ini, serta mengkaji rencana kerja di tingkat nasional dan lokal, maka tim proyek mengadakan satu kegiatan *team retreat* selama tiga hari; dimana dua hari digunakan untuk aktivitas outbound dan tiga hari untuk rapat pendalaman materi.

Hubungi Kami:

GTZ - International Services
Menara BCA, 46th floor
Jl. M.H Thamrin No. 1
Jakarta 10310 - Indonesia

Tel : +62 21 2358 7571
Fax : +62 21 2358 7570
harald.spahn@gtz.de
www.gitews.org
www.gtz.de

